

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA

Untari Enderwati¹⁾

untariendarwati@gmail.com

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Zainuddin Saenong²⁾ dan Manat Rahim²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa; (2) menguji dan menganalisis pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa. Jenis data menggunakan data sekunder yaitu data panel yang terdiri dari data time series tahun 2011-2016 dan data *cross section*, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Banten. Analisis data menggunakan Indeks Williamson dan Regresi Data Panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa termasuk kategori ketimpangan tinggi, yaitu nilai indeks Williamson lebih besar 1 dan cenderung mengalami penurunan. (2) tenaga kerja dan atau investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa yang dibuktikan oleh nilai probabilitas pengaruh tenaga kerja dan investasi yang lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (5%). Artinya bahwa semakin tinggi nilai investasi dan jumlah tenaga kerja, maka akan semakin mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa.

Kata kunci : *Ketimpangan, Tenaga Kerja, Investasi*

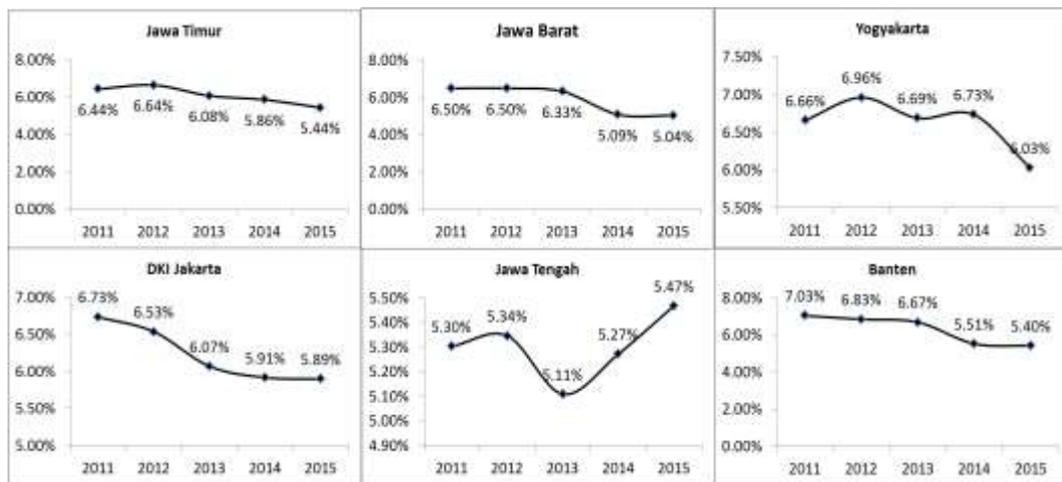
1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan negara. Proses pertumbuhan ekonomi merupakan proses pertumbuhan yang tidak sama dimana terdapat beberapa sektor bertumbuh dengan lebih cepat dari sektor-sektor lainnya. Sehingga, memang tidak dapat dihindarkan bahwa kemungkinan terjadinya ketimpangan pemerataan pendapatan antar wilayah/provinsi.

Pembangunan ekonomi merupakan sekumpulan perubahan yang sangat mendasar terhadap struktur ekonomi yang terjadi dalam jangka panjang yang dalam masa tersebut ditemukan adanya perubahan yang menitikberatkan pergeseran dari sektor primer menjadi sektor tersier yang bersifat subsisten (Todaro dan Smith, 2006; dan Tambunan, 2001). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran serta menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat ini diharapkan pendapatan masyarakat akan turut meningkat. Pendapatan per kapita yang tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih menjadi

indikator keberhasilan dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun regional (Suhartono, 2011).

Berdasarkan fenomena pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia tersebut, mengindikasikan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren menurun dalam periode 2011-2015 namun dalam periode yang sama terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa. Fenomena tersebut jika dianalisis menurut provinsi khususnya antar provinsi di Pulau Jawa akan ditemukan pola yang serupa. Hal terlihat pada perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa dalam periode 2011-2015 disajikan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Periode 2011-2015

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang telah membawa serangkaian perubahan mendasar pada struktur perekonomian wilayah khususnya antar provinsi di pulau Jawa. Perubahan mendasar atau transformasi struktural tersebut memiliki tahapan, proses, dan kecepatan yang berbeda-beda antara satu sektor ekonomi dengan sektor ekonomi lainnya dan antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Dengan demikian, antar sektor ekonomi dan antar provinsi memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda.

Ketimpangan antar wilayah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kebijakan investasi, konsentrasi aktifitas ekonomi wilayah, faktor geografis dan kependudukan, sumberdaya alam dan tingkat perkembangan aktifitas ekonomi di suatu wilayah (Todaro dan Smith (2006); Sjafrizal (2008), dan Jumadi (2015)). Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Murty (2000) yang menyatakan bahwa ketimpangan antar wilayah dalam suatu negara disebabkan oleh faktor aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, dan jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi investasi; investasi dan infrastruktur yang cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju.

Indikasi adanya ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut secara teoritis dikemukakan oleh Tambunan (2003), yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi adalah: konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar

daerah, perbedaan sumberdaya alam antar provinsi, perbedaan kondisi demografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Berdasarkan hasil telaah empiris, menunjukkan bahwa pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi ditemui hasil yang kontradiktif. Hasil penelitian Nizar dkk (2013), Sari (2012), Suindyah (2009), Saptomo (2008), Linda (2005), dan Maharani (2016) menemukan bahwa investasi dan atau tenaga kerja signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya Lumbantobing (2017), Rofii Dan Ardyan (2017), dan Bawuno dkk (2015) menemukan investasi dan atau tenaga kerja tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil telaah empiris, maka peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis bagaimana investasi dan tenaga kerja mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi dan bagaimana mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka secara sederhana rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa?
2. Apakah tenaga kerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar negara. Konsep pembangunan ini dikupas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan coba menganalisis secara kritis dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks negara. Walaupun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun perbincangan mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan pengusaha boleh menjelaskan sebab-sebab berlakunya ketiadaan pembangunan dalam sebuah negara. Pembangunan berwawasan lingkungan melihat kepada aspek kebajikan generasi akan datang melalui kehendak masa kini.

a. Konsep Pembangunan Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi pembangunan dapat menjelaskan daerah maju dengan daerah terbelakang atau hubungan antar kota dengan daerah belakangnya. Akan tetapi, sifat analisisnya bersifat general, artinya berlaku umum tidak seluruh hubungan, tidak peduli di mana tempat (negara) hubungan itu terjadi (Tarigan, 2005).

Pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Pendapatan per Kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan Nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan Nasional dan pendapatan per kapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Daerah. Dalam penelitian ini pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan Pendapatan per Kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi

pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005:19). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002).

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan menurut Boediono (1999), sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Veronica (2012)). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Beberapa pakar ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB_{t-1}).

c. Konsep Investasi

Investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan (Sumanto, 2006). Alasan utama orang melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dan tingkat keuntungan yang disebut return. Return yang diharapkan investor adalah kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Pada dasarnya investasi dapat dibedakan menjadi investasi finansial dan investasi non finansial. Investasi finansial adalah bentuk pemilikan instrumen finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal, surat berharga, obligasi, dan sejenisnya. Sedangkan investasi non finansial direalisasikan dalam bentuk investasi fisik (Badan Koordinasi Pasar Modal, 2005).

Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika modal asing tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan.

PMDN merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian

obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktunya minimal tahun. Menurut Undang-Undang tersebut, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh negara atau swasta nasional. Pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka untuk swasta/PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis seperti listrik, dan air.

d. Konsep Tenaga Kerja dan Upah

Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (UU RI No.13 Tahun 2003). Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja disebut juga dengan golongan produktif.

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun sehingga mengakibatkan timbulnya pengangguran. Pengangguran ini adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan. Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi digolongkan dalam kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri dari kelompok mereka yang bersekolah, kelompok yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lainnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin karena masyarakat tidak mempunyai pendapatan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya.

e. Konsep Ketimpangan

Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan antar sektor, spasial, serta pelaku pembangunan di dalam maupun antar daerah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergis antar sektor pembangunan sehingga setiap program pembangunan sektoral selalu dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah (Rustiadi dan Pribadi 2006). Namun demikian seringkali pembangunan wilayah yang dilaksanakan tidak merata, baik antar sektor maupun antar wilayah sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah. Menurut Chaniago *et al.* (2000) bahwa kesenjangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan atau ketidakberimbangan atau ketidaksimetrisan. Sehingga bila dikaitkan dengan pembangunan sektor atau wilayah, maka kesenjangan pembangunan tidak lain adalah suatu kondisi ketidaksimetrisan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang lazim ditunjukkan dengan perbedaan pertumbuhan antar wilayah. Disparitas pertumbuhan antar wilayah ini sangat tergantung pada perkembangan struktur (sektor-sektor) ekonomi dan struktur wilayah (perkembangan sarana dan prasarana sosial-ekonomi, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi baik darat, laut maupun udara, telekomunikasi, air bersih, penerangan, dll) serta keterkaitan dalam interaksi spasial secara optimal yang didukung dengan perkembangan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pengetahuan dan keterampilan) serta penguatan kelembagaan. Dalam tingkat yang tinggi, kesenjangan tersebut dapat mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan baik masalah sosial, politik ekonomi maupun lingkungan.

Trade off antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh, disparitas pendapatan yang dipengaruhi oleh luas negara, ketersediaan sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan (Fei dan Ranis (1964), Kuznets (1966), Adelman dan Moris (2003)). Miraza (2006) salah satu permasalahan utama dalam perencanaan wilayah adalah masalah transportasi karena merupakan urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dalam berbagai bidang dan sektor.

Pertambahan penduduk merupakan unsur penting yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Karena dengan bertambah penduduk dapat menjadi pasar potensial bagi permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang selanjutnya diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi demi terciptanya skala ekonomis (*economies of scale*) produk, menurunkan biaya-biaya produksi, dan menciptakan penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai. Dampaknya adalah dapat merangsang tingkat produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Permasalahan kepadatan penduduk akan memunculkan masalah lain, seperti: permukiman, penyediaan lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana, dan masalah sosial lainnya (Todaro dan Smith, 2006).

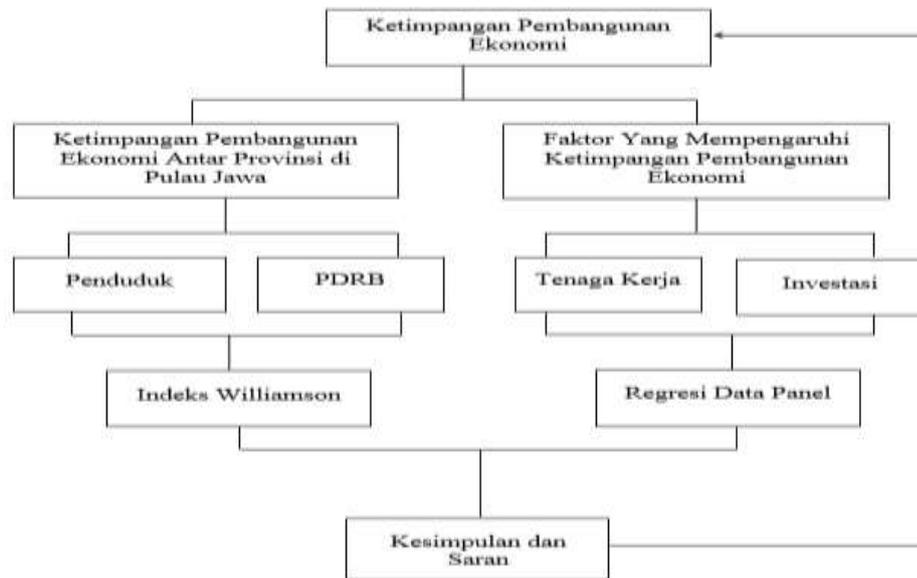
f. Penelitian Terdahulu

Lumbantobing (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta. Hasil penelitian adalah, (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi dalam negeri terhadap PDRB di DKI Jakarta. (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi luar negeri terhadap PDRB di DKI Jakarta.

Rofii dan Ardyan (2017) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS, menyimpulkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dalam periode 2010-2014.

Bawuno dkk (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado. Teknik analisis yang di gunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.

Berdasarkan fenomena struktur ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa diketahui bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Banten telah terjadi transformasi sektor dari sektor pertanian kearah sektor industri dan jasa. Secara teoritis jika terjadi transformasi sektor seharusnya terjadi pergeseran akumulasi modal (investasi) dan pegeseran tenaga kerja sehingga pemerataan pembangunan tercapai atau minimal dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir penelitian ini terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka Pikir

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian, tinjauan teoritis dan empiris, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Ketimpangan pembangunan ekonomi antar Provinsi Di Pulau Jawa tinggi.
- H2 : Investasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar Provinsi di Pulau Jawa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif/ eksplanatoris. Menurut Sugiyono (2005) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel ketimpangan pembangunan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa (Y) dan berkedudukan sebagai variabel terikat/dependen. Variabel selanjutnya adalah variabel investasi (X_1) dan variabel tenaga kerja (X_2) dan kedua variabel tersebut berkedudukan sebagai variabel bebas/independen.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Syafrizal, 2008). Model analisis indeks ketimpangan regional Williamson dengan formulasi sebagai berikut:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

dengan:

- V_w : Nilai indeks Williamson
 Y : PDRB per kapita provinsi di pulau Jawa
 \bar{Y} : PDRB per kapita pulau Jawa
 f_i : Jumlah penduduk provinsi di pulau Jawa
 n : Jumlah penduduk pulau Jawa

Semakin besar nilai Indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja yaitu mendekati 1 berarti semakin tinggi ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa, sebaliknya semakin rendah tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa, maka Indeks ketimpangan ketimpangan pembangunan ekonomi akan semakin mendekati 0. Oshima dalam Soetopo (2009). menetapkan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada taraf rendah, sedang atau tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

- Nilai Indeks > 1 , terjadi ketimpangan yang sangat tinggi
- Nilai Indeks $0,7-1$, terjadi ketimpangan yang tinggi
- Nilai Indeks $0,4-0,6$, terjadi ketimpangan yang sedang
- Nilai Indeks $< 0,3$, terjadi ketimpangan yang rendah

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi Dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa digunakan analisis regresi data panel. Berdasarkan model umum regresi data panel di atas, maka model umum regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$KPE_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{Log}(\text{INV}_{it}) + \beta_2 \text{log}(\text{TK}_{it}) + \mu_{it}$$

Dengan:

- KPE_{it} : Ketimpangan pembangunan ekonomi provinsi ke-i tahun ke-t.
 α_{it} : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi investasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa
 β_2 : Koefisien regresi tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa
 $\text{Log}(\text{INV}_{it})$: Investasi provinsi ke-i tahun ke-t.
 $\text{Log}(\text{TK}_{it})$: Tenaga kerja provinsi ke-i tahun ke-t.
 μ_{it} : *Error term*

Selanjutnya sebelum melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan penentuan model penaksir yang digunakan. Menurut Widarjono (2005), terdapat tiga model regresi data panel, yaitu (1) *Common Effect Models* (CEM), (2) *Fixed Effect Models* (FEM), dan (3) *Random Effect Models* (REM). Langkah-langkah penentuan model penaksir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penentuan model antara CEM Dan FEM

Penentuan model antara CEM Dan FEM digunakan uji Chow. Kriteria ujinya adalah dengan membandingkan antara nilai F statistik Chow dengan F table. Jika nilai F statistik Chow lebih besar dari nilai F table, maka model yang terpilih

adalah FEM, sebaliknya Jika nilai F statistik Chow lebih kecil dari nilai F table, maka model yang terpilih adalah CEM.

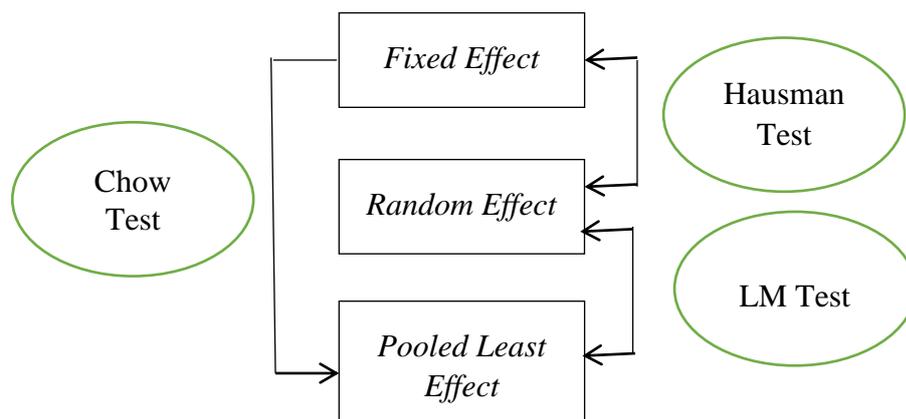
2. Penentuan model antara FEM Dan REM

Penentuan model antara FEM Dan REM digunakan uji Hausman. Kriteria ujinya adalah dengan membandingkan antara nilai F statistik Hasuman dengan *Chi-Square* table. Jika nilai F statistik Hasuman lebih besar dari nilai *Chi-Square* table, maka model yang terpilih adalah FEM, sebaliknya Jika nilai F statistik Hasuman lebih kecil dari nilai *Chi-Square* table, maka model yang terpilih adalah REM.

3. Penentuan model antara CEM Dan REM

Penentuan model antara CEM Dan REM digunakan *The Breusch-Pagan LM Test*. Kriteria ujinya adalah dengan membandingkan antara nilai F statistik *LM test* dengan F table. Jika nilai F statistik *LM Test* lebih besar dari nilai F table, maka model yang terpilih adalah REM, sebaliknya Jika nilai F statistik *LM test* lebih kecil dari nilai F table, maka model yang terpilih adalah CEM.

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan perhitungan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh suatu dugaan yang efisien. Diagram pengujian statistik untuk memilih model yang digunakan diperlihatkan pada Gambar 4.1. berikut.



Gambar 3.1. Model Pengujian Analisis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan berbasis pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan antar sektor, spasial, serta pelaku pembangunan di dalam maupun antar daerah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergis antar sektor pembangunan sehingga setiap program pembangunan sektoral selalu dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah (Rustiadi dan Pribadi 2006). Namun demikian seringkali pembangunan wilayah yang dilaksanakan tidak merata, baik antar sektor maupun antar wilayah sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah.

Tabel 4.1. Hasil Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Periode 2011-2016

Tahun Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata Rata
DKI Jakarta	0.955	0.959	0.756	0.745	0.746	0.977	0.856
Jawa Barat	2.849	2.761	2.692	2.626	2.589	2.523	2.673
Jawa Tengah	1.106	1.412	1.301	1.204	1.118	1.060	1.200
Jawa Timur	3.616	3.500	3.405	3.332	3.292	3.269	3.402
Yogyakarta	0.893	0.899	0.903	0.910	0.916	0.921	0.907
Banten	1.505	1.518	1.599	1.177	1.175	1.131	1.351

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2017

Hasil perhitungan indeks ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa seperti terlihat pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi yang masuk dalam kategori sangat tinggi di provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 3.402, Jawa Barat sebesar 2.673, Banten sebesar 1.351 dan Jawa Tengah sebesar 1.200, Sedangkan di Yogyakarta sebesar 0.907 dan DKI Jakarta sebesar 0.856 masuk dalam kategori tinggi. Secara keseluruhan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa termasuk dalam ketimpangan yang tinggi. Tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi khususnya di Jawa Timur dan Jawa Barat disebabkan banyaknya jumlah kabupaten/kota pada kedua provinsi tersebut, akibatnya rentang kendali pemerintah provinsi yang berkaitan penyediaan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi sangat panjang dan rendahnya mobilitas faktor produksi dan bahkan cenderung terpusat pada ibukota provinsi.

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar provinsi lebih disebabkan oleh faktor demografi yang meliputi perbedaan jumlah penduduk, tingkat dan kepadatan penduduk antar provinsi di Pulau Jawa. Faktor lainnya diduga juga menyebabkan terjadinya ketimpangan adalah faktor distribusi investasi yang tidak merata, mobilisasi faktor produksi antar provinsi yang relative rendah, dan faktor terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ibukota Negara Indonesia.

Dari hasil penentuan model estimasi yang tepat diketahui bahwa FEM yang terpilih untuk menganalisis dan menguji pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2016. Langkah selanjutnya dilakukan uji kelayakan model, yaitu uji koefisien determinasi, uji pengaruh simultan (uji F) dan uji pengaruh parsial (uji t).

a) Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar provinsi di Pulau Jawa

Dari hasil output *Fixed Effect Models* (FEM) lempiran 2, diketahui bahwa nilai koefisien regresi tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa sebesar -1.445 dan nilai probability t statistics sebesar 0.0382 yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Dengan demikian pada tingkat keyakinan 95 persen dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa periode 2011-2016.

Berpengaruhnya tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa dapat dijelaskan secara teoritis bahwa struktur ekonomi semua provinsi di Pulau Jawa telah mengalami transformasi ke sektor industri dan atau jasa yang ditandai oleh adanya penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa. Dengan adanya mobilisasi tenaga kerja tersebut akan memperbaiki atau meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan, namun dalam kenyataannya mobilisasi tenaga kerja tersebut belum berjalan optimal karena adanya disparitas jumlah penduduk dan kendala geografis sehingga masih ditemukan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa.

b) Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Jawa

Dari hasil output *Fixed Effect Models* (FEM) lampiran 2, diketahui bahwa nilai koefisien regresi investasi terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa sebesar -1.765 dan nilai probability t statistics sebesar 0.0168 yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05). Dengan demikian pada tingkat keyakinan 95 persen dapat disimpulkan bahwa variabel investasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa periode 2011-2016. Secara teoritis diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi suatu wilayah/provinsi adalah alokasi investasi dan distribusi investasi. Tidak meratanya alokasi investasi dapat menyebabkan tidak meratanya distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Kurangnya investasi langsung di suatu wilayah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Pernyataan tersebut dibuktikan dalam penelitian ini dimana diketahui bahwa nilai investasi atau PMTB di Pulau Jawa sebagian besar bersumber dari provinsi DKI Jakarta (37%) dan Jawa Timur (21%). Akibatnya distribusi dan alokasi investasi di Pulau Jawa tidak merata sehingga nilai PDRB yang timpang antara provinsi yang satu dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yang selanjutnya menjadi penyebab tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa periode 2011-2016

Hasil perhitungan ketimpangan pembangunan ekonomi dengan menggunakan indeks Williamson diketahui bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa termasuk dalam kategori ketimpangan maksimum/sangat tinggi ($C_v > 1$). Walaupun ketimpangan pembangunan ekonomi tergolong sangat tinggi, namun ada kecenderungan yang menunjukkan semakin menurunnya ketimpangan tersebut. Kontributor yang paling tertinggi adalah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dengan rata-rata indeks ketimpangan tahun 2011-2016 adalah 2.673 dan 3.402 .

Terjadinya ketimpangan disebabkan oleh terkonsentrasinya kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu, yaitu DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta di samping sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, juga merupakan ibukota Negara Indonesia yang tentunya pembangunan ekonomi seperti infrastruktur terkonsentrasi di DKI Jakarta. Hal ini bias dilihat pada rata-rata kontribusi investasi/PMTB DKI provinsi di pulau Jawa dimana DKI Jakarta merupakan kontributor terbesar, yaitu sebesar 37%. Kontradiktif dengan investasi/PMTB, jumlah penduduk DKI Jakarta dibanding kelima provinsi lainnya menempati urutan kelima terendah sebesar 7% dari jumlah penduduk di Pulau Jawa. Olehnya itu tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa disebabkan oleh terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada satu daerah tertentu yang diikuti dengan ketimpangan penduduk antar provinsi tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2011-2016, termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi yang dibuktikan oleh nilai indeks Williamson yang lebih besar dari satu.
2. Hasil uji kelayakan model membuktikan bahwa tenaga kerja dan investasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan negative terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2011-2016. Artinya bahwa meningkatnya jumlah tenaga kerja dan investasi akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa.

b. Saran

1. Hendaknya kegiatan ekonomi tidak terpusat pada salah satu provinsi sehingga alokasi dan distribusi investasi dan tenaga kerja lebih merata sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa.
2. Dari hasil analisis ketimpangan diketahui bahwa tren indeks ketimpangan cenderung mengalami penurunan sehingga direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan uji konvergensi ketimpangan pembangunan ekonomi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman dan Moris. 2003. *Economic Growth dan Social. Equity in Developing Countries*, California: Stanford University Press
- Adisasmita, 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu*,. Yogyakarta.
- Akita, T. dan Alisyahbana, A.S. 2002. *Regional Income Inequity in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis*. Bulletin of Indonesia Economic Studies.
- Amstrong dan Taylor. 2001. *Regional Economics and Policy*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Anwar A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Tinjauan*. Kritis. P4W Press. Bogor.
- Anwar dan Rustiadi. 1999. *Desentralisasi Spasial Melalui Pembangunan Agropolitan, dengan Mereplikasi Kota-Kota Menengah-Kecil di Wilayah Perdesaan*. Makalah

- Lokakarya Pendayagunaan Sumberdaya Pembangunan Wilayah di Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi I, BPFE*. Yogyakarta.
- Baltagi, B. H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data. Ed ke-3*. Chicester: John Wiley dan Sons. Ltd.
- Bawuno, E. Eunlike, Kalangi, J.P dan Samuel, J.I. 2015. *Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Budiharsono, S. 1996. *Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Antar daerah, 1987-1995*. Disertasi. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. IPB. Bogor.
- Chaniago *et al.* 2000. *Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- Fuadi, Ridho. 2013. *Analisis Ketimpangan Perekonomian Pada Provinsi di Pulau Jawa Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah, serta Solusi dengan Peningkatan Pendapatan dari Sektor Basis (Periode 1991-2010)*. Tesis. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. IPB. Bogor
- Hartono, Budiantoro. 2007. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Hendra Esmara 1975. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Kumpulan*. Esei untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo. Jakarta: PT Gramedia. 1987.
- Jhingan, M. L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo. Persada: Jakarta.
- Jumadi,. 2015. *Karakteristik Struktur Output Sektor Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Indonesia. 2015*. Tesis. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. IPB. Bogor.
- Kerlinger, 2000. *“Asas-asas Penelitian Behavioral”*. Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuznets. 1966. *Economic Growth and Contrubution of Agriculture*. In Eicher, C.K. and Witt, L.W. (edisi). *Agriculture in Economic Development*. McGraw Hill. New York.
- Linda. 2005. *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara*.
- Lumbantobing. 2017. *Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta*.
- Maharani. 2016. *Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto factor PDRB faktor Di Sumatera Utara*.
- Masli, Lili. 2016. *Analisis factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*.
- Miraza, Bachtiar Hasan. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. ISEI. Bandung.
- Murty. 2000. *Regional Disparities: Need and Measures for Balanced Development*. New Delhi: Kanishka Publishers.
- Nizar, Chairul. Hamzah Abubakar dan Syahnur Sofyan. 2013. *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Aceh. Halaman 1-8.

- Richardson, 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Lembaga. Penerbit FEUI.
- Rofii dan Ardyan. 2017. *Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing factor PMA faktor Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur*.
- Rostow dan Musgrave. 2003. *Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim dan D.R. Panuju. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. CrestPent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Salvatore. 2007. *Mikroekonomi. Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson. 2001. *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta:PT.
- Saptomo. 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Investasi Publik, Pertumbuhan Investasi Swasta, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Periode 1992-2006*.
- Sari, Mutia, Syechalad, Mohd Nur dan Majid, Sabri Abd. 2012. *Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Kesenjangan PDRB Per Kapita Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol 3 No. 2. November 2016.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat: Pranita Offset.
- Soetopo. 2009. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Pulau di Negara Indonesia. Tesis. Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. IPB. Bogor.
- Suindyah. 2009. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur*.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar. Kebijakan*. Edisi kedua. Jakarta : Kencana.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tarigan. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi. Aksara
- Tarigan. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi. Aksara
- Todaro, M.P dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. Terjemahan: Haris Munandar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Walad. 2011. *Pasar Tenaga Kerja dan Upah Minimum*. <http://walad.blog.usu.ac.id/>. [Desember 2017]
- Widarjono. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wijaya, Adi. 2001. *Kajian Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Indonesia*. PEP-LIPI, Jakarta.
- Wiranata. 2004. *Pengembangan Investasi di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*.